

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya yang melimpah, baik alam maupun manusia. Hal tersebut memunculkan potensi ekonomi yang baik untuk negara berkembang seperti Indonesia. Namun hal itu perlu diwujudkan melalui kolaborasi secara dinamis dan berkelanjutan antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat guna menciptakan sistem serta tujuan rencana pembangunan yang tepat agar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan dimulai dari tingkatan daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengukur keadaan ekonomi di suatu daerah. Hal tersebut berkaitan dengan kemajuan infrastruktur, kegiatan ekonomi, serta kemakmuran penduduk di suatu daerah.

Untuk mengatur regulasi perihal pembangunan daerah, maka pemerintah membuat peraturan tertulis yang diwujudkan melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU no.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di dalamnya terdapat perubahan sistem dari berpusat menjadi otonomi yang berdampak positif, karena dengan begitu pemerintah daerah dapat mengatur dan terlibat langsung dalam proses pembangunan daerahnya masing-masing. Dimana hal tersebut sangat signifikan pengaruhnya dikarenakan sumber daya alam dan

manusia setiap daerah berbeda-beda, maka perlu strategi dan sistem yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya disesuaikan dengan kondisi geografis serta sumber daya yang ada. Dengan begitu sistem, strategi, dan sasaran pembangunan dapat berjalan secara tepat dan efisien.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah harus disesuaikan dengan kondisi serta ketersediaan sumber daya yang ada baik alam maupun manusia. Dengan demikian pemerintah daerah melakukan prioritas pembangunan daerah guna mengoptimalkan serta mempercepat pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah menurut harga konstan maupun harga berlaku mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah (Clara Ayu Monica, 2017).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kondisi sektor-sektor ekonomi pada suatu wilayah yang dihitung berdasarkan nilai tambah barang dan jasa akibat aktivitas ekonomi. Dengan kondisi sektor yang sudah diketahui maka pemerintah perlu menentukan skala prioritas sektor yang akan dikembangkan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan ekonomi (Arsyad, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, 2016). Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan analisis lebih mendalam untuk dapat menentukan kebijakan dan sistem yang akan digunakan untuk mewujudkan

pembangunan daerah yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan masalah, keinginan, dan keadaan daerah masing-masing.

Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 menurut (Anonym, 2021) memiliki luas wilayah sebesar 1.371,78 km² dan jumlah penduduk sebanyak 949.318 orang. Dilihat dari struktur demografinya Kabupaten Ponorogo memiliki penduduk dengan usia muda (0-14 tahun) sebanyak 176.989 penduduk atau 18,64% dari total penduduk, usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 657.084 penduduk atau 69,21% dari total penduduk, sedangkan untuk usia tua (65+) sebesar 115.245 atau 12,13% dari total penduduk. Pada usia produktif terbagi menjadi dua yaitu angkatan kerja (berkerja dan pengangguran terbuka) sebesar 71,52% dan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 28,48%. Dengan kondisi tersebut Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan mempunyai potensi untuk berperan dalam menciptakan pembangunan ekonomi nasional khususnya wilayah Provinsi Jawa Timur melalui pembangunan daerah.

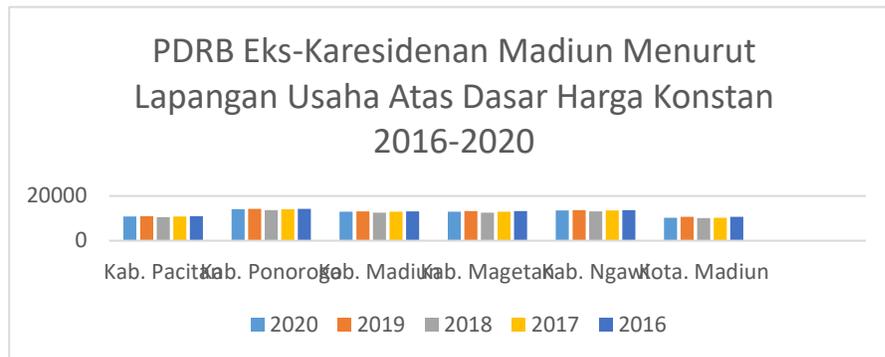
**Tabel 1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha**

TAHUN	Menurut Lapangan Usaha	
	PDRB Harga Konstan (juta rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
2016	12.305.652,04	05,29
2017	12.933.449,31	05,10
2018	13.615.231,83	05,27
2019	14.297.100,01	05,21
2020	14.168.621,37	-0,90

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo

Pada Tabel 1.1 menunjukkan adanya potensi yang cukup menjanjikan di Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan memiliki probabilitas yang tinggi untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Hal itu dikarenakan karena pada tahun 2016 hingga 2019 PDRB menurut harga konstan selalu mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2020 menurun, namun penurunan tersebut tidak lebih rendah dari PDRB pada dua tahun sebelumnya yaitu PDRB tahun 2018. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo memiliki tingkat pertumbuhan yang fluktuatif namun cenderung stabil pada tahun 2016 hingga 2019 dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dikarenakan faktor eksternal yang tidak terduga yaitu adanya pandemi covid-19 yang mengacaukan perekonomian global.

Grafik 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Wilayah Eks Karesidenan Madiun Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Periode 2016-2020 dalam Milyar Rupiah



Sumber : BPS Jawa Timur

Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jawa Timur termasuk kedalam wilayah eks-karesidenan madiun bersama Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Dilihat dari grafik 1.1 Kabupaten Ponorogo menjadi kabupaten yang memiliki nilai Produk Domestik Regional Produk paling tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2016 hingga 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa diantara wilayah Eks Karesidenan madiun Kabupaten Ponorogo menjadi wilayah paling berpotensi untuk tumbuh dalam perekonomian.

Karena adanya potensi pada Kabupaten Ponorogo, maka peneliti memilih daerah tersebut untuk melihat sektor yang memiliki potensi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memiliki daya saing nasional. Selain itu penelitian ini dilakukan agar menjadi informasi bagi pemerintah daerah untuk

menentukan kebijakan, strategi, dan sistem operasional dalam merencanakan pembangunan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sektor pengadaan air, konstruksi, infomasi, real estate, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah sektor basis memiliki peran dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomidi Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah pengaruh dan kontribusi sektor basis lebih besar dibandingkan dengan sektor non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sektor pengadaan air, konstruksi, infomasi, real estate, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui apakah sektor basis memiliki peran dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomidi Kabupaten Ponorogo.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan kontribusi sektor basis dibandingkan dengan sektor non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang peranan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan empat variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan PDRB Kabupaten Ponorogo, PDRB Provinsi Jawa Timur, serta sektor unggulan Kabupaten Ponorogo sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dan Jawa timur serta berasal dari jurnal, buku-buku, literatur, bacaan ilmiah dan penelitian terdahulu. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka digunakan metode LQ, Shift Shareserta Overlay untuk mengetahui sektor unggulan, sedangkan untuk mengetahui peranan dan besaran pengaruh dengan metode analisis regresi linier berganda dan menghitung kontribusi sektor.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu dan pemahaman teoritis yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah, serta meningkatkan pengetahuan tentang peran sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan salah satu bahan referensi dan informasi penelitian yang berkaitan dengan peran sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Dapat digunakan untuk informasi dan bahan kajian sebagai dasar didalam merencanakan kebijakan pembangunan. Sehingga terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor sektor yang ada di Kabupaten Ponorogo dapat tercapai dengan baik.